

# **PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DPKAD KOTA LHOKSEUMAWE**

**ZAINIR & JAMALUDDIN**

Prodi Akuntansi

STIE Lhokseumawe

Email : jamaluddin.821986@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara empirik tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe dan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Serta pengaruh keduanya terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 65. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi anggaran dan transparansi mempunyai hubungan (korelasi) yang kuat dengan pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. (2) Partisipasi anggaran dan transparansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. (3) Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. (4) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. (5) Partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

**Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Transparansi, Pengelolaan Keuangan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Nordiawan, 2007:149).

Seiring adanya tuntutan pemerintahan yang baik dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya era *new public management*, dengan tiga prinsip utamanya yang berlaku secara universal yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas telah mendorong adanya usaha untuk meningkatkan kinerja dibidang pengelolaan keuangan, dengan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Halim (2007:330) pengelolaan keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengendalian terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dapat dilakukan dari luar maupun dari dalam. Dari luar dilakukan oleh DPRD dan masyarakat, sedangkan pengawasan dari dalam dilakukan oleh inspektorat yang ada di daerah.

Penerimaan dan pengeluaran daerah harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai, untuk itu perlu dilakukan analisis selisih terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan. Prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan, karena pada dasarnya

masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah.

Partisipasi penganggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawab dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Partisipasi bawahan akan meningkatkan kebersamaan, menumbuhkan rasa memiliki, inisiatif untuk menyumbangkan ide dan keputusan yang dihasilkan dapat diterima. Tingkatan pegawai harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran karena pimpinan biasanya kurang mengetahui kegiatan sehari-hari pada tingkatan bawah. Partisipasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka seluruh elemen akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Sulistoni, 2003: 15).

Transparansi anggaran dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh Pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu : menurut Andrianto (2007:113) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik diperlukan partisipasi anggaran dan transparansi anggaran. Dengan adanya partisipasi anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran diharapkan meningkatkan pengelolaan keuangan, yakni, ketika tujuan telah direncanakan dan disetujui secara partisipatif, karyawan akan menginternalisasi tujuan tersebut dan mereka akan memiliki tanggung jawab secara personal untuk mencapainya melalui keterlibatan dalam proses anggaran.

Di samping itu transparansi anggaran merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah.

Partisipasi anggaran mempunyai hubungan yang erat dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah membutuhkan peran semua

anggota yang ada dalam pemerintahan. Agar tujuan pemerintah mudah tercapai, maka diperlukan suatu tata kelola keuangan yang berpedoman pada partisipasi anggaran.

Di samping partisipasi anggaran transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Selain adanya partisipasi pegawai dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pengelolaan keuangan dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau setiap saat.

Dilihat dari kinerja pemerintah yang semakin menurun selama satu tahun ini dengan kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe secara umum masih mempunyai kelemahan terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada kantor DPKD Kota Lhokseumawe. Dalam indikator menunjukkan efektivitas masih dibawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan kota Lhokseumawe yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana dikarenakan masih rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target pencapaian kinerja belum efektif. Maka dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan

berbagai perubahan untuk mengarah keperbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, banyak pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe?
- 2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe?
- 3) Apakah partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe?

## **C. Landasan Teoritis**

### **1. Partisipasi Anggaran**

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002: 57). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anggaran publik menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Menurut Suyanto (2011: 18), partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu proses yang didalamnya terdapat individu yang terlibat dan

mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. Partisipasi penyusunan. Anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi.

Menurut Atkinson dalam Christine dan Agustina (2010:103) partisipasi anggaran merupakan suatu metode penyusunan anggaran yang meliputi proses pengambilan keputusan bersama dan semua bagian setuju untuk menyusun target anggaran. Sedangkan, partisipasi anggaran menurut Brownell dalam Falikhatun (2007: 66) adalah proses yang menggambarkan individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran serta perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut.

Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2002: 58) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggung-jawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena (Sulistoni, 2003: 15):

- 1) Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan.
- 2) Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran.
- 3) Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.
- 4) Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif.
- 5) Semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

## **2. Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Partisipasi penyusunan anggaran diharapkan meningkatkan kinerja keuangan, yakni, ketika tujuan telah direncanakan dan disetujui secara partisipatif, karyawan akan menginternalisasi tujuan tersebut dan

mereka akan memiliki tanggung jawab secara personal untuk mencapainya melalui keterlibatan dalam proses anggaran. Menurut Siegel dan Marconi dalam (Syam dan Djalil, 2006: 132) Penerapan partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran memberikan banyak manfaat antara lain:

- 1) Partisipan (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi *ego-involved* tidak hanya *task-involved* dalam kerja mereka.
- 2) Partisipasi akan menaikkan kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan menaikkan kerja sama anggota kelompok dalam penerapan sasaran.
- 3) Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran.
- 4) Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di antara bagian-bagian organisasi.

Partisipasi penyusunan anggaran diharapkan meningkatkan kinerja keuangan, yakni, ketika tujuan telah direncanakan dan disetujui secara partisipatif, karyawan akan menginternalisasi tujuan tersebut dan mereka akan memiliki tanggung jawab secara personal untuk mencapainya melalui keterlibatan dalam proses anggaran.

Partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan kinerja yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, di mana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut.

Dalam konteks yang lebih spesifik, partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses di mana para individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran (Robbins, 2008: 58).

Secara garis besar, penyusunan anggaran dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Top down approach* (bersifat dari atas kebawah)  
Dalam penyusunan anggaran ini, manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah sehingga pelaksana anggaran hanya melakukan apa saja yang telah disusun.
2. *Bottom up approach* (bersifat dari bawah keatas)  
Anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya diserahkan atasan untuk mendapatkan pengesahan. Dalam pendekatan ini, manajer tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran.
3. Kombinasi *top down* dan *bottom up*  
Kombinasi antara kedua pendekatan inilah yang paling efektif. Pendekatan ini menekankan perlunya interaksi antara atasan dan bawahan secara bersama sama menetapkan anggaran yang terbaik bagi perusahaan.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:391), partisipasi anggaran mempunyai dua dampak

positif bagi organisasi dan kinerja manajerial. Pertama, partisipasi anggaran dapat meningkatkan komitmen pribadi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, partisipasi anggaran dapat menciptakan pertukaran informasi yang efektif antara bawahan dan atasan selama tahap pengkajian dan persetujuan.

Sementara itu, menurut Siegel dan Marconi dalam Christine dan Agustina (2010: 103) partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian tujuan organisasi. Bawahan mempunyai kesempatan untuk melaporkan informasi yang dimiliki sehingga atasan dapat memilih keputusan terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

### **3 Keunggulan Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran mempunyai keunggulan terhadap motivasi manajerial Anthony dan Govindarajan (2007: 87), yaitu:

1. Komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita, yang disebabkan kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas citacita anggaran apabila berada dalam kendali manajer, dibandingkan bila dipaksa secara eksternal.
2. Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil keahlian dan pengetahuan pribadi pembuat anggaran. Pertukaran informasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan

selama fase peninjauan dan persetujuan.

3. Penyusunan anggaran partisipatif sangat menguntungkan bagi lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, karena manajer atas pusat pertanggungjawaban memiliki informasi terbaik mengenai variabel yang memengaruhi pendapatan dan beban.

Keikutsertaan bawahan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan komitmen pribadi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Bawahan dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama tahap pengkajian dan persetujuan sehingga dapat menghasilkan pertukaran informasi yang efektif dalam menetapkan standar target yang akan diraih.

Sementara itu, menurut Shim dan Siegel dalam Mulyadi dan Natalina (2000: 3) partisipasi anggaran diperlukan agar anggaran dapat digunakan untuk memotivasi karyawan supaya dapat memperbaiki kinerja dan sikap. Karyawan harus dapat memberikan rekomendasi, merevisi angka-angka dalam anggaran bila diperlukan, dan menyetujui ataupun tidak menyetujui item-item yang utama. Input karyawan diperlukan karena mereka sangat memahami operasi.

Selain itu, menurut Hansen dan Mowen (2001 : 738) partisipasi anggaran juga memiliki dampak positif yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar memaksakan anggaran pada manajer-manajer subordinat. Partisipasi anggaran memungkinkan

para manajer subordinat mempertimbangkan bagaimana membangun anggaran, mengkomunikasikan rasa pertanggungjawaban kepada para manajer subordinat dan mendorong adanya kreativitas. Selain mengarahkan para manajer ke arah kinerja yang lebih baik, partisipasi anggaran juga memiliki keuntungan dalam melibatkan individu yang memiliki pengetahuan lebih mengenai kondisi-kondisi lokal dalam meningkatkan proses perencanaan keseluruhan.

Murray dalam Christine dan Agustina (2010: 103) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran memungkinkan terjadi transfer informasi baik dari bawahan ke atasan maupun sebaliknya. Transfer informasi ini memiliki dua keuntungan, yaitu atasan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik yang dapat disampaikan kepada bawahan sehingga kinerja akan meningkat serta atasan dapat memperoleh tingkat anggaran yang lebih baik atau lebih sesuai bagi perusahaan karena atasan memperoleh informasi mengenai lingkungan yang sedang dan akan dihadapi.

Selain itu, menurut Siegel dan Marconi dalam Falikhatun (2007: 211) partisipasi anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian tujuan organisasi. Bawahan mempunyai kesempatan untuk melaporkan informasi yang dimiliki kepada atasannya sehingga atasan dapat memilih keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Partisipasi anggaran akan meningkatkan inisiatif yang lebih besar

disuruh level manajemen sehingga seluruh sub bagian akan lebih memahami masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan anggaran.

#### **4. Kelemahan Partisipasi Anggaran**

Meskipun partisipasi anggaran memiliki banyak keunggulan, namun juga memiliki beberapa kelemahan. Menurut Hansen dan Mowen (2001: 739) partisipasi anggaran memiliki tiga masalah potensial sebagai berikut :

- 1) Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kelemahan partisipasi anggaran terjadi ketika sebagian manajer cenderung untuk menetapkan anggaran terlalu ketat atau terlalu longgar karena merasa bahwa tujuan anggaran merupakan tujuan manajer itu sendiri. Kesalahan ini dapat menurunkan tingkat kinerja manajer yang bersangkutan. Manajer akan kehilangan ketertarikan dan kinerjanya akan menurun jika tujuan yang ditetapkan terlalu mudah untuk dicapai. Dalam hal ini, tantangan penting untuk individu-individu yang agresif dan kreatif.
- 2) Bersikap ceroboh dalam penganggaran. Kecerobohan ini terjadi ketika seorang manajer dengan sengaja menilai pendapatan terlalu rendah atau menilai biaya terlalu tinggi. Hal ini dilakukan agar manajer mudah mencapai anggaran dengan mengurangi risiko yang harus dihadapinya. Kecerobohan dalam penganggaran juga mengikat sumber daya yang mungkin dapat



digunakan di tempat lain dengan lebih produktif.

3) Partisipasi palsu (*pseudo participation*).

Timbulnya partisipasi semu dari para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi semu timbul ketika manajemen atas hanya memperoleh penerimaan formal terhadap anggaran dari para manajer subordinatnya dengan tidak mencari input yang sesungguhnya.

## 5. Transparansi

### 1) Pengertian Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh Pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu: menurut Andrianto (2007:113) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Sementara menurut Hafiz (2000: 64) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2006: 78). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dalam memberikan pengertian transparansi, penulis mengacu pada teori transparansi pelayanan publik. Pertimbangannya adalah karena transparansi diadakan untuk melakukan pelayanan terhadap publik dalam memberikan informasi. Menurut Ratminto dan Winarsih (2009: 181) transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi

masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Menurut Sumarsono (2009:28) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Mursidi (2009: 121) Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

## 2) Indikator Transparansi

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and

*balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah

membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah (Sedarmayanti, 2009:289)

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Krina (2003: 21) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek:

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Krina (2003:22) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai

berikut :

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- 2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 3) Kemudahan akses informasi.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

#### D. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi

terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui regresi linier berganda. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Menurut Sugiyono (2007:277) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Adapun bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Pengelolaan keuangan  
a : Konstanta  
X1 : Partisipasi anggaran  
X2 : Transparansi  
b 1-2 : Koefesien Regresi  
e : *Error Term*

#### E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hasil Penelitian

###### 1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini digunakan nilai kritis sebesar 0,3

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Mengenai Partisipasi Anggaran (X<sub>1</sub>)**

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,490	0,3	Valid
2	2	0,634	0,3	Valid
3	3	0,529	0,3	Valid
4	4	0,653	0,3	Valid
5	5	0,703	0,3	Valid
6	6	0,631	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dibagi kepada responden, semua dari 6 kuesioner untuk variabel butir pernyataan dinyatakan valid partisipasi anggaran (X<sub>1</sub>) yang karena  $r_{hitung} >$  nilai kritis.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Mengenai Transparansi (X<sub>2</sub>)**

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,430	0,3	Valid
2	2	0,502	0,3	Valid
3	3	0,539	0,3	Valid
4	4	0,550	0,3	Valid
5	5	0,562	0,3	Valid
6	6	0,506	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Dari 6 kuesioner untuk variabel pernyataan dinyatakan valid karena transparansi (X<sub>2</sub>) semua butir  $r_{hitung} >$  nilai kritis.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Mengenai Pengelolaan Keuangan (Y)**

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,555	0,3	Valid
2	2	0,745	0,3	Valid
3	3	0,411	0,3	Valid
4	4	0,774	0,3	Valid
5	5	0,472	0,3	Valid
6	6	0,558	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Dari 6 kuesioner untuk variabel pengelolaan keuangan (Y) semua butir pernyataan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} >$  nilai kritis.

## 2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih

terhadap gejala yang sama, dimana hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjang seberapa jauh suatu alat ukur dapat diandalkan. Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas melalui program SPSS.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Jumlah Responden	Butir Pernyataan	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha
1.	Partisipasi Anggaran ( $X_1$ )	100	6	0,656	0,60
2.	Transparansi ( $X_2$ )	100	6	0,616	0,60
3.	Pengelolaan Kkeuangan (Y)	100	6	0,608	0,60

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, tingkat reliabilitas dari kuesioner untuk variabel ( $X_1$ ) sebesar  $0,656 > 0,60$ , ( $X_2$ ) sebesar  $0,616 > 0,60$  dan variabel (Y) yaitu  $0,608 > 0,60$ . Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang diperoleh di atas, maka butir pernyataan untuk variabel *independen* ( $X_1$  dan  $X_2$ ) dan variabel *dependen* (Y) adalah reliabel.

## 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1) Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas diuji dengan statistik non parametik yaitu uji *Kolmogorof Smirnov* (K-S), dengan kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada besaran nilai *Kolmogorof Smirnov* (K-S) Z dan *Asymp Sig* (2-tailed), variabel dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada signifikansi 95%. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		X-1	X-2	Y
N		65	65	65
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	4.2226	4.2743	4.1434
	Std. Deviation	.51372	.42985	.51555
Most Extreme Differences	Absolute	.148	.152	.134
	Positive	.088	.102	.092
	Negative	-.148	-.152	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		1.191	1.222	1.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117	.101	.196
a. Test distribution is Normal.				

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dari nilai partisipasi anggaran ( $X_1$ )  $0,117 > 0,05$ , dan transparansi ( $X_2$ )  $0,101 > 0,05$ . Berarti variabel  $X_1$  dan  $X_2$  berdistribusi normal serta probabilitas (sig) dari pengelolaan keuangan ( $Y$ )  $0,196 > 0,05$  artinya variabel  $Y$  juga berdistribusi normal.

#### 1) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang

sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Varian Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance*  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka disimpulkan terjadi multikolinieritas atau sebaliknya jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Pada penelitian ini hasil perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Partisipasi Anggaran	763	1.310
Transparansi	763	1.310

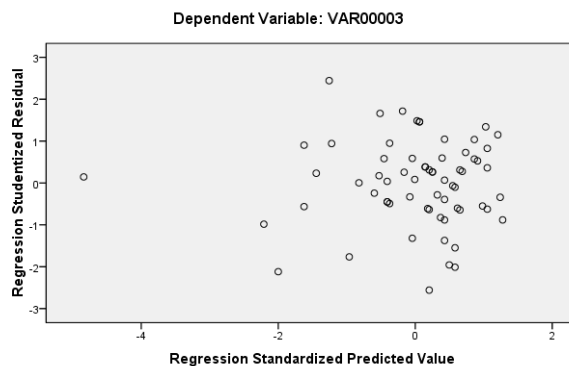
b. Dependent Variable: Ketepatan waktu pelaporan keuangan

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 4.9 di atas, terlihat nilai *tolerance* dan nilai VIF menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai  $VIF < 10$  (partisipasi anggaran ( $X_1$ ) 1,310 dan transparansi ( $X_2$ ) 1,310). Sementara nilai *tolerance* juga menunjukkan semua variabel bebas (partisipasi anggaran ( $X_1$ ) 0,763 dan transparansi ( $X_2$ ) 0,763). Hasil ini menandakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas dan baik untuk digunakan.

2) Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji ini muncul apabila nilai kesalahan atau residual dari model yang dianalisis tidak memiliki *varian* yang konstan dari suatu observasi. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah *estimator*. Grafik *scatter plot* dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika data tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2005:77). Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, terlihat hasil pengujian heterokedastisitas mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe, tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

## 2 Hasil Analisis Data

Teknik analisis data mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe yang dirumuskan dalam fungsi regresi linear berganda. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.200	.470		.425	.672
Partisipasi Anggaran (X-1)	.504	.098	.503	5.160	
Transparansi (X-2)	.424	.117	.354	3.630	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.10, maka di peroleh persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,200 + 0,504X_1 + 0,424X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstan sebesar 0,200 artinya jika partisipasi anggaran, dan transparansi dianggap konstan, maka nilai rata-rata pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 20%
2. Koefisien partisipasi anggaran ( $X_1$ ) sebesar 0,504 (50,4%) berarti jika nilai partisipasi anggaran meningkat

1%, maka pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 50,4%

3. Koefisien transparansi ( $X_2$ ) sebesar 0,424 (42,4%) yang artinya jika nilai transparansi meningkat 1%, maka pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe akan meningkat sebesar 42,4%.

### 3 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

1. Hasil Uji Koefisien Korelasi  
Adapun hasil koefisien korelasi ( $R$ ) seperti terlihat pada Tabel 4.11 berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.742 <sup>a</sup>	.551	.536	.35109	2.330

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran , Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan



Berdasarkan hasil penelitian, koefisien korelasi (R) sebesar 0,742 (74,2%) yang bermakna partisipasi anggaran dan transparansi mempunyai hubungan (korelasi) yang kuat dengan pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

## 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) yaitu sebesar 0,536 (53,6%) artinya partisipasi anggaran dan transparansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe sebesar 53,6%. Sedangkan sisanya 46,4% (100 – 53,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti akuntabilitas, pengendalian internal, dan lain-lain.

## 4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi berganda.

### 1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ).

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.10 di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Variabel partisipasi anggaran ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 5,160 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan diketahui  $t_{tabel}$  sebesar 1,66864 dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , artinya partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.
- 2) Variabel transparansi ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,630 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 dan diketahui  $t_{tabel}$  sebesar 1,66864 dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , artinya transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

### 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan (uji F) mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.369	2	4.684	38.003	.000 <sup>a</sup>
	Residual	7.642	62	.123		
	Total	17.011	64			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran ,  
Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan  
Keuangan

Hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 38,003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan 5% dan  $df = n-k-1$  (  $65 - 2-1= 62$ ) diperoleh sebesar 3,15. Dengan demikian  $F_{hitung}$  (38,003) >  $F_{tabel}$  (3,15) artinya secara simultan partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

## 5 Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, pengujian secara parsial dapat dijelaskan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Atas dasar hasil pengujian hipotesis dan deskriptif jawaban responden maka dapat disimpulkan bahwa baiknya pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh partisipasi dalam penganggaran yang baik.

Partisipasi bawahan akan meningkatkan kebersamaan, menumbuhkan rasa memiliki, inisiatif untuk menyumbangkan ide dan keputusan yang dihasilkan dapat diterima. Tingkatan pegawai harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran karena pimpinan biasanya kurang mengetahui kegiatan sehari-hari pada tingkatan bawah. Menurut Halim (2007:330) pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis juga menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Transparansi anggaran pada DPKAD Kota Lhokseumawe merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya,

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah di Kota Lhokseumawe.

Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

Adanya aspek partisipasi anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah akan memberikan penilaian bahwa aparat tersebut mampu dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif sebagai bentuk dari upaya untuk meningkatkan kinerja aparat dalam pengelolaan keuangan. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola keuangan yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan:

1. Partisipasi anggaran dan transparansi mempunyai hubungan (korelasi) yang kuat dengan pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.
2. Partisipasi anggaran dan transparansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.
3. Secara parsial (uji-t) partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe dan transparansi juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.
4. Secara simultan (uji F) partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

## G. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, dapat disaran beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, sehingga untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan baik

menurut DPKAD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan, sebaiknya pemerintah daerah menerapkan anggaran partisipatif dan transparansi yang lebih baik lagi agar DPKAD tersebut memiliki motivasi yang tinggi.

- 2) Diharapkan agar setiap pegawai dalam menjalankan aktivitas penyusunan anggaran lebih aktif lagi untuk berpartisipasi, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan anggaran dan melakukan evaluasi atas anggaran yang ditetapkan, dengan demikian memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan.
- 3) Diharapkan kepada pihak yang berwenang sebagai pengambil kebijakan di masa yang akan datang untuk mengalokasikan anggaran yang telah tersusun dengan tepat sasaran berdasarkan target yang ditetapkan secara transparansi dan partisipatif.
- 4) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang berbeda dan sampel yang lebih besar sehingga dapat mencakup pada seluruh pengelola keuangan daerah.

## H. DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Nico. (2007). **Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government**. Malang: Bayumedia Publishing.

Anggraini, Risty Dwi. (2013). **Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan anggaran Dana Bos Dalam Program RKAS di SD Negeri Pacarkeling VIII Surabaya**, Jurnal Akuntansi.

Bastian, Indra. (2006). **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

Christine, Dwi K., dan Agustina, Lidya (2010). **Pengaruh Participation Budgeting, Information Asimetry dan Job Relevant Information terhadap Budget Slack pada Institusi Pendidikan**. Jurnal Akuntansi Vol. 2. No. 2.

Falikhatun, (2007). **Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok**. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6, No, 2.

Ghozali, Imam. (2005). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hafiz, Abdul. (2011). **Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan**

**Publik (Sebuah  
Tantangan).**

Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei  
2006.

- Halim, Abdul. (2007). **Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.** Jurnal Maksi.
- Hasan, Iqbal. (2002). **Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.** Bogor selatan Ghalia Indonesia.
- Horngren, Sundem, Stratton. (2002). ***Introduction to Management Accounting,*** 12th edition, New Jersey : Pentice-Hall International Inc.
- Krina. (2003). **Indikator dan alat ukur prinsip Transaparansi, partisipasi dan akuntabilitas** .[.http://www.goodgovernance.com](http://www.goodgovernance.com). diakses, 10 Agustus 2015.
- Latif, Abdul. (2009). **Pengaruh Partisipasi anggaran, Kejelasan Tujuan dan Evaluasi Terhadap Kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo.** Jurnal: Akuntansi.
- Mardiasmo. (2006). **Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance,*** Jurnal Akuntansi
- Mardiasmo. (2002). **Akuntansi Sektor Publik.** Yogyakarta: Andi.
- Maryanti, Elda Sofia. (2013). **Pengaruh Desentralisasi Fisikal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi empiris pada DPKAD Kota di Sumatra Barat.** Jurnal Akuntansi.
- Mulyadi, J. dan Natalia, N. (2000). ***Budgeting: Pedoman lengkap langkah-langkah penganggaran.*** Alih Bahasa, Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. (2001). **Sistem Akuntansi,** Jakarta: Salemba Empat.
- Mursidi. (2009). **Akuntansi Pemerintahan Indonesia.** Bandung: Rafika Aditama.
- Nordiawan, Deddi. (2007). **Akuntansi Pemerintahan.** Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 **Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.**
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD.**
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2009), **Manajemen Pelayanan.** Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. (2008). **Perilaku Organisasi.** Buku Satu. Terjemahan Diana Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. (2002). **Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.** Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. (2009). **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.** Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2007). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,** Cet XIV, Bandung: Alfabeta.
- Sulistoni, G. (2003). **Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan,** SOMASI, Nusa Tenggara Barat.
- Sumarno, J. (2005). **Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta).** *Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.*
- Sumarsono, Hadi. (2009). **Analisis Kemandirian Otonomi Daerah.** Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1. No 1. 2009
- Suyanto. (2011). **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.**
- Syam, Fazli dan Muslim Djalil. (2006). **Pengaruh Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran: Interaksi Antara Partisipasi Anggaran dan Penggunaan Anggaran sebagai Alat Ukur Kinerja dengan Orientasi Manajerial.**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, **Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**